

BAB III

HEGEMONI POLITIK FENOMENA CALON TUNGGAL PILKADA DI KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN BOYOLALI

3.1 Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Kota Semarang

Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal pada tahun 2020 terdapat 25 daerah, hal ini mengalami kenaikan signifikan terkait penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal. Penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal memiliki keunikan dan juga hal yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai keterkaitannya pada penyebab terjadinya pilkada dengan calon tunggal tersebut dan faktor-faktor terjadinya pilkada dengan calon tunggal dari segi perspektif hegemoni politik. Penyelenggaraan pilkada calon tunggal di Provinsi Jawa Tengah terdapat 6 daerah yang menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal, salah satunya terjadi di Kota Semarang. Penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang cukup menarik dikarenakan terjadi hanya diikuti satu pasangan calon saja, kemudian juga faktor petahana yang maju kembali pada pencalonan kepala daerah tersebut juga menjadikan penelitian fenomena menarik untuk dibahas. Mengenai penelitian terkait penyelenggaraan pilkada calon tunggal yang terdapat di Kota Semarang, dari informan meliputi dari instansi KPU Kota Semarang dan perwakilan partai politik yang berkoalisi pada penyelenggaraan pilkada tersebut.

Fenomena pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2020, memiliki suatu hal yang menarik, yaitu keterkaitannya dengan adanya kelompok yang mendominasi dalam penyelenggaraan pilkada calon tunggal tersebut

yag juga menyebabkan pengaruh dari terjadinya fenomena tersebut. Keterkaitan hegemoni politik yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang akan dibuktikan dari informasi para informan yang menyampaikan tentang keterkaitanya pengaruh hegemoni politik yang terjadi dengan terjadinya pilkada calon tunggal di daerah tersebut.

3.1.1 Fenomena Pilkada Calon Tunggal Kota Semarang dari Segi Perspektif Hegemoni Politik.

Penyelenggaran Pilkada dengan calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang telah selesai dalam penyelenggaraanya dimenangkan oleh petahana, hal ini sangat menarik mengenai proses terjadinya pilkada calon tunggal dan juga pada saat penyelenggaraan itu terjadi. Pada penelitian ini, peneliti melakukan proses wawancara dengan informan dari perwakilan KPU Kota Semarang. Peran dan tujuan wawancara dengan pihak KPU Kota Semarang mengenai tugas Kpu Kota Semarang sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pilkada di Kota Semarang, hal ini diharapkan informan bisa menyampaikan terkait proses dan hasil yang terjadi dari fenoemna tersebut. Wawancara dilaksanakan dengan Herry Abriyanto, selaku anggota komisioner Kpu Kota Semarang divisi teknis penyelenggaraan pemilu.yang menyatakan bahwa:

“Kami dari KPU Kota Semarang melihat faktor dari terjadinya calon tunggal dari kualitas figur petahana yang sudah berkinerja dengan baik menjadi pertimbangan parpol. Dikarenakan dalam hal ini bila merujuk dari syarat ambang batas masih sangat memenuhi dari parpol lainnya untuk mencalonkan pada kontestasi Pilkada Kota Semarang.” (Hasil wawancara dengan Hery Abriyanto, Anggota Komisioner KPU Kota Semarang).

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyebab terjadinya fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang menurut pihak

KPU Kota Semarang disebabkan oleh, kualitas kinerja yang dilaksanakan oleh petahana sangat berdampak terhadap pada kepuasan masyarakat Kota Semarang. Sehingga dalam hal ini, juga berpengaruh terhadap pemikiran dari partai politik lainnya untuk tidak mencalonkan melawan dari pasangan calon tunggal. Kemungkinan tersebut dilihat dari keseluruhan perwakilan partai politik yang ada di Kota Semarang dengan mengambil sikap politiknya mendukung pasangan calon tunggal pada kontestasi Pilkada yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2020..

Melalui hasil wawancara tersebut juga dapat disimpulkan terkait fenomena pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dengan keterkaitannya perspektif hegemoni politik yang terjadi, ditegaskan oleh informan bahwa tidak terlalu berpengaruh mengenai faktor hegemoni politik yang terjadi dengan penyebab terjadinya pilkada secara calon tunggal. Dikarenakan dalam hal ini faktor kualitas kinerja petahana lebih memiliki pengaruh terhadap munculnya calon tunggal yang terjadi di Pilkada Kota Semarang pada tahun 2020. Walaupun dalam hal ini informan juga menyampaikan, partai dari petahana memiliki dominasi yang kuat di Kota Semarang. Pernyataan mengenai penyelenggaraan Pilkada di Kota Semarang pada tahun 2020 juga disampaikan oleh perwakilan PKS Kota Semarang. PKS Kota Semarang merupakan salah satu partai politik yang ikut mendukung dari pasangan calon tunggal yang juga mendukung dari pasangan calon tunggal. Alasan lain mengenai terpilihnya PKS Kota Semarang pada informan penelitian ini, dikarenakan melihat dari jumlah rekapitulasi kursi, PKS mendapatkan 6 kursi yang juga dapat disimpulkan mempunyai kekuatan dari ambang batas untuk melakukan koalisi dengan partai politik lainnya untuk menandingi dari pasangan calon tunggal.

Wawancara dengan perwakilan PKS Kota Semarang dilaksanakan dengan Ali Umar Dhani, Selaku Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada PKS Kota Semarang menyatakan bahwa:

“PKS Kota Semarang mempertimbangkan mengenai faktor biaya politik yang harus dipersiapkan, semisal ada kandidat lawan politik yang kami usungkan. Lainnya juga pertimbangan dari keseluruhan partai politik sudah mendukung, alhasil kami juga memutuskan untuk bergerak bersama mendukung dari pasangan calon tunggal.” (Hasil Wawancara dengan Ali Umar Dhani, Selaku Ketua Bidang Pilkada dan Pemilu PKS Kota Semarang)

Pernyataan yang disampaikan dari perwakilan PKS Kota Semarang memperlihatkan biaya politik sangat penting dalam persiapan dari partai politik calon kepala daerah untuk mengikuti pilkada. Biaya politik tersebut digunakan untuk proses serangkaian kegiatan calon kepala daerah bisa memenangkan penyelenggaraan pilkada apalagi dalam hal ini bila maju akan melawan petahana yang memiliki figur dan popularitas cukup tinggi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang pada akhirnya partai politik lainnya berpikir kembali terkait pengajuan calon kepala daerah dalam mengikuti kontestasi Pilkada Kota Semarang pada tahun 2020. Hal tersebut juga disampaikan sebagai penguat pertimbangan sikap politik PKS Kota Semarang dalam pilkada calon tunggal waktu tersebut, disampaikan oleh Ali Umar Dhani yang menyatakan bahwa:

“Terkait sikap politik PKS Kota Semarang terkait ini, guna menciptakan suasana suhu politik yang nyaman dan juga agar tidak dimusuhi dari penguasa. Karena sikap politik yang kami ambil juga berpengaruh pada akses bantuan politik yang kami dapatkan nantinya, selain juga kinerja petahana yang sudah cukup baik.” (Hasil wawancara dengan Ali Umar Dhani, selaku Ketua Bidang Pilkada Pks Kota Semarang)

Sikap politik PKS Kota Semarang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang tahun 2020, ikut mendukung dari pasangan calon tunggal. Hal ini cukup

menarik dikarenakan sikap PKS secara level nasional menjadi penyeimbang politik atau sebagai kelompok oposisi dari pemerintah pusat. Keputusan sikap politik PKS Kota Semarang tentunya juga sudah melalui beberapa pertimbangan yang dipikirkan oleh PKS Kota Semarang. Salah satunya meliputi aspek mengenai anggaran bantuan politik yang diberikan bila ikut mendukung dari kelompok koalisi yang menjadi kepala daerah. Kemudian juga aspek terkait adanya langkah komunikasi politik dari petahana sebelum dari penyelenggaraan pilkada yang juga menyebabkan dari keseluruhan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kota Semarang ikut mendukung dari petahana tersebut. Keputusan sikap politik dari PKS Kota Semarang juga pastinya melihat dari kinerja petahana yang sudah cukup baik dalam membangun infrastruktur maupun dari aspek pelayanan publik yang menjadikan pertimbangan untuk yakin mendukung dari petahana tersebut maju dalam pencalonan kepala daerah kembali.

Wawancara juga dilakukan dengan perwakilan Partai Demokrat Kota Semarang, posisi partai tersebut dengan melihat jumlah rekapiulasi suara mendapatkan 6 kursi perwakilan di DPRD Kota Semarang. Hasil wawancara ini juga akan menegaskan kembali terkait penyebab terjadinya fenomena calon tunggal dan juga mengenai sikap politik Partai Demokrat Kota Semarang pada penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang tahun 2020. Wawancara dilaksanakan dengan Novriadi, selaku Ketua Badan Pembinaan, Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Partai Demokrat Kota Semarang, yang menyatakan bahwa:

“Partai Demokrat Kota Semarang, dalam Pilkada calon tunggal, mengambil sikap politik partai yang melihat dari figur politik petahana dan juga pastinya melihat dari kinerja petahana yang prestatif. Hal ini juga menjadi kepuasan pada masyarakat yang terlihat pada partisipasi aktif pada saat pilkada

kemarin.” (Hasil wawancara dengan Novriadi, selaku perwakilan Partai Demokrat Kota Semarang)

Pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan Partai Demokrat Kota Semarang lebih menegaskan kembali mengenai terjadinya penyelenggaraan pilkada calon tunggal di Kota Semarang melihat dari figur petahana yang memiliki popularitas dan elektabilitas cukup tinggi di kalangan masyarakat, hal ini tentunya juga diseimbangi oleh kinerja petahana yang dinilai baik dan berdampak pada juga kepada kepuasan masyarakat. Pernyataan ini dapat dilihat dari angka partisipasi masyarakat yang meningkat pada penyelenggaraan pilkada pada tahun 2020. Kemudian pernyataan dari Partai Demokrat Kota Semarang dalam keterkaitannya dari pengaruh hegemoni politik yang terjadi pada terjadinya fenomena tersebut, dari informan menyatakan bahwa:

“Parpol di Kota Semarang dari hasil rekapitulasi suara parlemen, cukup berimbang walaupun dalam hal ini PDI-P memiliki jumlah kursi terbanyak, tapi tidak menjadi pengaruh dominasi politik yang terjadi. Karena pengaruh terbesar lebih melihat dari figur politik dan juga *track record* kinerja petahana yang sudah baik dalam memimpin.” (Hasil wawancara dengan Novriadi, selaku perwakilan Partai Demokrat Kota Semarang)

Pernyataan yang telah disampaikan oleh perwakilan Partai Demokrat Kota Semarang dapat disimpulkan fenomena calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dikarenakan pengaruh figur politik dari petahana dan juga diimbangi oleh kinerja petahana yang sudah baik dalam memimpin. Mengenai hegemoni politik yang terjadi di Kota Semarang, memang dalam hal ini PDI-P memiliki kursi terbanyak dari jumlah perwakilan di DPRD Kota Semarang dengan 19 perwakilan, namun hal ini tidak menjadikan dominasi yang kuat dalam pengaruhnya terjadinya pilkada calon tunggal di Kota Semarang.

3.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Pilkada Calon Tunggal

Kota Semarang

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelenggaraan pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang ini membahas mengenai faktor umum dan khusus yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Hal ini nantinya akan dapat menjadikan rujukan untuk memperbandingkan mengenai persamaan dan perbedaan dari terjadinya Pilkada calon tunggal di kedua wilayah tersebut. Penyelenggaraan pilkada calon tunggal pada tahun 2020 sudah terselenggara, namun dalam proses terdapat suatu hal yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian mengenai proses terjadinya fenomena tersebut. Selain dari pada paparan yang telah disampaikan sebelumnya, namun ada faktor lain yang menjadikan suatu fenomena tersebut menarik. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Herry Abriyanto, selaku Anggota Komisioner KPU Kota Semarang menyatakan bahwa:

“Adanya suatu efek pengaruh dari faktor popularitas dan kinerja petahana yang dinilai oleh masyarakat memiliki tingkat kepuasan yang cukup baik, yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat pada penyelenggaraan Pilkada saat itu, menjadikan suatu rekor baru terkait partisipasi masyarakat dalam mencoblos waktu itu.” (Hasil wawancara dengan Hery Abriyanto, selaku Anggota komisioner Kpu Kota Semarang)

Pengaruh kinerja dari petahana yang mendaftarkan calon kepala daerah pada penyelenggaraan pilkada tersebut, menjadikan suatu efek *domino* terhadap meningkatnya popularitas dari calon kepala daerah. Sehingga dalam hal ini juga menciptakan suatu pemikiran dari partai politik untuk mendukung pasangan calon tunggal tersebut. Bukti nyata terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja petahana, terlihat pada aspek partisipasi masyarakat yang meningkat pada penyelenggaraan pemilu untuk memilih dari petahana tersebut menjadi kepala

daerah kembali. Pernyataan yang disampaikan dari perwakilan KPU Kota Semarang mengenai faktor faktor baik secara umum maupun spesifik terkait terjadinya pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang tahun 2020 perlu dipertegas kembali oleh pernyataan dari informan lainnya terkait kondisi yang terjadi di lapangan. Mengenai pernyataan terkait fenomena tersebut juga disampaikan oleh perwakilan PKS Kota Semarang yang diwakilkan oleh, Ali Umar Dhani, selaku Ketua Bidang Pilkada dan Pemilu PKS Kota Semarang yang menyatakan bahwa:

``Kami melihat sosok figur politik yang lebih berpengaruh dalam hal ini, seperti yang diketahui petahana bisa dikatakan cukup baik dalam membangun figur kepemimpinan kepada masyarakat. Kemudian juga melalui pertimbangan kinerja petahana yang cukup baik sehingga menciptakan kepuasan masyarakat menjadi pertimbangan kami.'' (Hasil wawancara dengan Ali Umar Dhani, selaku Ketua Bidang Pilkada PKS Kota Semarang)

Pernyataan yang disampaikan oleh PKS Kota Semarang menegaskan kekuatan figur politik yang dibangun diimbangi oleh kinerja oleh petahana menjadikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang terdapat di Kota Semarang. Faktor-faktor terjadinya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang juga disampaikan oleh informan perwakilan Partai Demokrat yang menyatakan bahwa:

``Faktor lainnya yang mempengaruhi terjadinya pilkada calon tunggal yaitu dengan langkah komunikasi politik dari petahana, dengan menggandeng para partai politik terutama, Partai Demokrat Kota Semarang untuk berkoalisi pada kontetasi pilkada tersebut.'' (Hasil wawancara dengan Novriadi, selaku perwakilan Partai Demokrat Kota Semarang)

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan terjadinya pilkada calon tunggal di Kota Semarang, juga dikarenakan pengaruh langkah komunikasi politik yang cukup baik dilakukan oleh kelompok yaitu melalui partai pengusung maupun dari calon

kepala daerah itu sendiri. Komunikasi politik dilakukan oleh petahana juga menjadikan suatu pemikiran partai politik lainnya untuk berkolaborasi dan bergerak bersama memajukan Kota Semarang dengan tergabung dalam koalisi pasangan calon tunggal tersebut.

3.2. Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Kabupaten Boyolali

Penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Boyolali juga diselenggarakan dengan pasangan calon tunggal. Hal ini juga menjadi penelitian yang sangat menarik untuk digali lebih dalam mengenai informasi dari para informan terkait proses terjadinya pilkada dengan calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020, dengan melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 telah selesai diselenggarakan dengan kemenangan pasangan Said-Wahyu, namun dalam hal ini terdapat hal yang menarik untuk diteliti mengenai proses terjadinya pilkada calon tunggal yang terdapat di Kabupaten Boyolali tersebut. Salah satunya yaitu terkait sikap politik oleh partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Boyolali dengan tidak adanya koalisi untuk menandingi pasangan calon tunggal pada kontestasi pilkada tersebut. Informan dalam penelitian fenomena pilkada calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 berisi tentang perwakilan dari partai politik yang mendukung dan tidak mendukung dari pasangan calon tunggal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Instansi KPU Kabupaten Boyolali yang akan menyampaikan mengenai keterkaitannya pada terjadinya problematika tersebut.

3.2.1 Fenomena Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Boyolali dari Segi

Perspektif Hegemoni Politik.

Penyelenggaraan Pilkada dengan calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Boyolali telah selesai dalam penyelenggaraannya dimenangkan oleh pasangan Said-Wahyu, hal ini sangat menarik mengenai proses terjadinya pilkada calon tunggal dan juga pada saat penyelenggaraan itu terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses wawancara dengan informan dari perwakilan KPU Kabupaten Boyolali. Peran dan tujuan wawancara dengan pihak KPU Kabupaten Boyolali mengenai tugas KPU Kabupaten Boyolali sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Boyolali, hal ini diharapkan informan bisa menyampaikan terkait proses dan hasil yang terjadi dari fenomena tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan perwakilan KPU Kabupaten Boyolali, diwakilkan oleh Maya Yudayanti, selaku Anggota Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Boyolali yang menyatakan bahwa:

“Terkait Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Boyolali, telah selesai dengan kemenangan pasangan calon tunggal sejumlah 95,60 %. Dalam proses pencalonan kepala daerah sebelumnya terdapat syarat mendaftar melalui partai politik dengan mampu memenuhi ambang batas parlemen sejumlah 20% atau sebesar minimal 9 kursi di parlemen. Dengan komposisi kursi parlemen di Kabupaten Boyolali 35 Kursi Pdp Perjuangan, 4 Kursi Partai Golkar, 3 kursi Pks, 2 kursi Pkb dan 1 kursi Partai Gerindra.”(Hasil wawancara dengan Maya, selaku perwakilan KPU Kabupaten Boyolali)

Dari pernyataan yang disampaikan terkait jumlah suara parlemen, jelas terlihat dari kekuatan dominasi yang terjadi pada parlemen oleh Partai PDI Perjuangan. Melihat dari jumlah kursi di parlemen tersebut, masih terdapat kemungkinan adanya lawan politik bila ingin maju melalui jalur partai politik pada kontestasi Pilkada Kabupaten Boyolali Tahun 2020. KPU Boyolali melalui

perwakilannya juga menyampaikan terkait pengaruh hegemoni politik dengan terjadinya Pilkada Kabupaten Boyolali, dengan menyatakan bahwa:

“Terkait Dominasi tersebut terdapat pada partai politik tertentu, yang mendominasi di parlemen. Tetapi dengan terdapatnya dominasi yang terjadi, masih memungkinkan dari partai politik lainnya mencalonkan kepala daerah pada Pilkada tersebut. Terlepas juga sebelumnya ada calon melalui independen yang hendak maju, namun karena tidak memenuhi syarat, calon tersebut tidak maju pada kontestasi Pilkada Boyolali” (Hasil wawancara dengan Maya Yuayanti, selaku perwakilan KPU Kabupaten Boyolali)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan terkait terjadinya Pilkada calon tunggal dengan pengaruh hegemoni politik yang terjadi, hal tersebut dibenarkan oleh informan. Pengaruh adanya kelompok yang mendominasi melalui kekuatan partai politik yang dibangun melalui jalur parlemen menyebabkan keterbatasan ruang yang dimiliki oleh partai politik lainnya untuk mengajukan lawan politik melalui koalisi pada kontestasi Pilkada Kabupaten Boyolali tersebut.

Pada pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya, sudah dijelaskan mengenai jumlah perolehan suara kursi di DPRD Kabupaten Boyolali, partai Golkar Kabupaten Boyolali mendapatkan perolehan 4 kursi. Jumlah perolehan kursi tersebut merupakan terbesar kedua pada perolehan kursi Pemilihan Legislatif DPRD Kabupaten Boyolali. Melihat dari rincian perolehan kursi dari partai politik, masih memungkinkan terbentuknya koalisi untuk menandingi dari pasangan calon tunggal tersebut. Melainkan dari proses dinamika politik yang terjadi di lapangan, Partai Golkar mendukung dari pasangan calon tunggal tersebut. Hal ini menjadi suatu perhatian yang menarik melihat dari sikap politik Partai Golkar Kabupaten Boyolali. Tanggapan mengenai sikap politik dari partai Golkar terkait pilihan politik yang diambil dan juga menyampaikan terkait penyebab terjadinya fenomena

Pilkada dengan calon tunggal di Kabupaten Boyolali disampaikan pihak Partai Golkar Kabupaten Boyolali oleh Agus Rosaldi, selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kabupaten Boyolali yang menyatakan bahwa:

“Partai Golkar melihat terjadinya fenomena tersebut, terkait dari pengaruh figur politik dari calon kepala daerah yang sudah memiliki popularitas di kalangan masyarakat. Selain itu pastinya pengaruh kuat dari dominasi yang terjadi oleh PDI-P menyebabkan keterbatasan ruang bagi parpol lainnya” (Hasil wawancara dengan Agus Rosaldi, Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kabupaten Boyolali)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sikap politik Partai Golkar Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali pada tahun 2020, dengan mendukung dari pasangan calon tunggal melihat dari kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini dipengaruhi dari adanya kelompok yang mendominasi sangat kuat di daerah tersebut, sehingga menyebabkan pada kemungkinan untuk tidak bisa menandingi dari kelompok yang sangat mendominasi tersebut. Selain dari pada itu, mengenai kualitas figur politik yang sekiranya nanti akan dicalonkan menjadi kepala daerah semisal dari partai selain partai PDI-P ini berkoalisi, tidak memiliki popularitas dan peluang yang besar dalam kontestasi Pilkada dengan melawan pasangan calon tunggal tersebut. Informan juga mengakui bahwa hegemoni politik terjadi di Kabupaten Boyolali, berbanding terbalik dengan yang terjadi di Kota Semarang, indikator mengenai calon kepala daerah yang sebelumnya juga telah menjadi wakil kepala daerah tidak terlalu berpengaruh terhadap faktor penyebab terjadinya calon tunggal tersebut.

Melalui pernyataan sikap politik dari pihak Partai Golkar Kabupaten Boyolali, juga dapat ditegaskan bahwa terjadinya fenomena pilkada secara calon tunggal di Kabupaten Boyolali berkaitan dengan hegemoni politik yang terjadi di

daerah setempat. Pernyataan tersebut diperkuat dari pihak perwakilan Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Boyolali, sikap politik PKS Kabupaten Boyolali dengan menjadi partai politik yang tidak mendukung atau sebagai kelompok oposisi juga menjadi suatu hal yang menarik terkait pengambilan keputusan tersebut. Maka dari itu, informasi dari perwakilan PKS Kabupaten Boyolali sangat dibutuhkan mengenai keterkaitannya dengan keputusan sikap politik yang diambil dan juga mengenai pernyataan terhadap fenomena pilkada calon tunggal dengan melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Wawancara dengan perwakilan PKS Kabupaten Boyolali diwakilkan dengan Nur Arifin, selaku Ketua PKS Kabupaten Boyolali melalui pernyataannya bahwa:

``Kami mengambil sikap politik sebagai oposisi dikarenakan sebagai langkah pengawasan dan penyeimbang politik dari penguasa nantinya. Adapun hal lain, yang menjadikan terjadinya fenomena tersebut, menurut kami disebabkan oleh syarat ambang batas tidak tercapai, yang dalam hal diengaruhi pada kekuatan dominasi politik yang terjadi'' (Hasil wawancara dengan Nur Arifin, selaku Ketua PKS Kabupaten Boyolali)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya fenomena Pilkada dengan calon tunggal dilihat dari perspektif hegemoni politik yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020, dikarenakan pengaruh ambang batas pada proses pencalonan kepala daerah yang menyebabkan dari PKS Kabupaten Boyolali tidak bisa mencalonkan kepala daerah pada konstetasi Pilkada tersbut. Selain dari ambang batas, alam hal ini ada keterkaitannya juga dari kelompok yang sangat mendominasi di daerah tersebut, terlihat dari hasil rekapitulasi suara legislatif DPRD Kabupaten Boyolali. Informan menegaskan terkait hegemoni politik yang terjadi ada kondisi demokrasi di Kabupaten Boyolali. Melalui pernyataan tersebut memperkuat juga pernyataan informan dari perwakilan

partai Golkar Boyolali yang menyatakan penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal terdapat pada adanya kelompok yang dominan di daerah tersebut, sehingga menyebabkan lawan politik tidak dapat menandingi dari kekuatan politik yang dibangun dari kelompok dominan tersebut.

Mengenai hasil dari wawancara yang telah dilaksanakan informan juga menyatakan terkait sikap politik PKS Kabupaten Boyolali untuk menjadi oposisi dengan tidak mendukung pasangan calon tunggal, guna sebagai langkah penyeimbang keputusan politik dari penguasa dan juga sebagai upaya pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Tanggapan mengenai fenomena pilkada calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020, juga disampaikan oleh perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP) Kabupaten Boyolali. LSM yang bergerak dalam pemantauan penyelenggaraan Pemilu ini juga menyampaikan pernyataannya yang diwakili oleh Andi Sarjono, selaku Ketua KIPP Kabupaten Boyolali menyatakan bahwa:

“Kami melihat terdapat dua pengaruh yang sangat mencolok dari terjadinya fenomena tersebut. Pertama mengenai terjadinya dominasi politik yang terjadi oleh salah satu partai politik tertentu. Kedua, mengenai pelaksanaan pendidikan politik yang belum maksimal diterapkan” (Hasil Wawancara dengan Andi Sardjono, selaku Ketua KIPP Kabupaten Boyolali).

Dari pernyataan beliau menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pesta demokrasi yang terjadi di Kabupaten Boyolali, terdapat beberapa fokus perhatian yang menjadi kewenangan LSM yang bergerak dalam pemantauan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Hasil yang didapatkan oleh pihak LSM menyatakan adanya hegemoni politik yang terjadi, melihat dari kekuatan dari suatu kelompok yang

mendominasi melalui partai politik yang berkuasa. Selain daripada itu, pengaruh pendidikan politik terhadap proses penyelenggaraan pesta demokrasi yang telah berlangsung di Kabupaten Boyolali juga menjadi suatu hal yang disesalkan ke depannya. Pengaruh kualitas pendidikan politik yang masih rendah, menyebabkan kualitas dari pilihan masyarakat dalam penyelenggaraan pilkada yang masih belum optimal. Pendidikan politik merupakan suatu aspek yang sangat vital, dikarenakan memiliki tujuan untuk mencerdakan pemikiran kepada masyarakat mengenai pentingnya keputusan yang tepat terkait pilihan politik yang diambil.

Mengenai paparan pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan terkait tanggapan terhadap fenomena Pilkada calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020 dengan melihat dari segi perspektif hegemoni politik, adanya keterkaitan kelompok yang mendominasi dari suatu daerah yang memiliki kekuatan kekuasaan melalui partai politik tersebut. Hal ini bila dikaitkan dengan konsep hegemoni politik dengan penjelasan yang disampaikan oleh Antonio Gramsci ada keterkaitan Konsep hegemoni politik dan fakta yang terjadi di lapangan. Bila melihat dari problematika yang terjadi dari pernyataan informan, terdapatnya realita hegemoni politik. Dan kaitannya pada peran dari masyarakat politik dalam mempengaruhi kebijakan yang bertujuan pada alat untuk memperahankan kekuasaan.

3.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fenomena Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Boyolali

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang terjadi di Kabupaten Boyolali ini membahas mengenai faktor umum

dan khusus yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Berdasarkan aspek tersebut, nantinya akan dapat menjadikan suatu rujukan untuk membandingkan mengenai persamaan dan perbedaan dari terjadinya pilkada calon tunggal di kedua wilayah tersebut. Penyelenggaraan pilkada calon tunggal pada tahun 2020 sudah terselenggara, namun dalam proses terdapat suatu hal yang menarik untuk dijadikan bahan penelitian mengenai proses terjadinya fenomena tersebut.

Beberapa pernyataan yang telah disampaikan merupakan faktor-faktor baik secara umum dan khusus yang menyebabkan terjadinya penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada yang terjadi di Kabupaten Boyolali juga terdapat faktor baik secara umum maupun khusus yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut. Penyampaian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali juga disampaikan oleh perwakilan informan KPU Kabupaten Boyolali, melalui Maya Yudayanti yang menyatakan bahwa:

“KPU Kabupaten Boyolali menjawab secara normatif terkait yang terjadi di lapangan. Hal tersebut selain dari adanya faktor dominasi politik yang terjadi, juga melainkan terkait kekuatan pengaruh figur politik yang cukup kuat menyebabkan pada keikutsertaan masyarakat dari tokoh yang disegani di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Kabupaten Boyolali yang cenderung tidak mau ambil pusing dalam memilih atau dengan bersifat pragmatis dalam memilih pilihan politik yang diambil” (Hasil Wawancara dengan Maya Yudayanti, selaku perwakilan KPU Kabupaten Boyolali)

Melalui pernyataan yang telah disampaikan oleh informan perwakilan KPU Kabupaten Boyolali, dapat disimpulkan faktor figur politik dan pengaruh ketokohan menjadi suatu pengaruh kuat bagi masyarakat dalam memilih pilihan politiknya. Hal tersebut bila dikaitkan dengan terjadinya fenomena calon tunggal,

dapat dikaitkan dengan pilihan politik masyarakat yang lebih melihat secara pragmatis pada suara parlemen yang menghasilkan kekuatan pada salah satu kelompok partai politik tertentu, dengan mengikuti tokoh yang memiliki sumber daya sosial maupun politik di wilayah setempat.

Pernyataan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali, juga disampaikan perwakilan Partai Golkar Kabupaten Boyolali oleh Agus Rosaldi, selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kabupaten Boyolali menyampaikan bahwa:

“Faktor lainnya keterkaitannya dengan adanya peran *local strongman* sebagai aktor non politik pada terjadinya fenomena tersebut maupun kemenangan besar pada hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Boyolali pada tahun 2020. Kemudian juga faktor netralitas birokrasi dalam mobilisasi kekuasaan guna menciptakan dominasi politik yang terjadi.”(Hasil wawancara dengan Bapak Agus Rosaldi, selaku Sekretaris Fraksi Partai Golkar Kabupaten Boyolali).

Pada pernyataan yang telah disampaikan oleh perwakilan Partai Golkar Kabupaten Boyolali menjadikan penelitian ini menarik untuk dibahas mengenai faktor-faktor yang telah disampaikan terkait penyebab terjadinya fenomena tersebut. Secara umum disampaikan bahwa faktor terjadinya Pilkada secara calon tunggal juga dari faktor anggaran politik yang dipersiapkan untuk mempersiapkan serangkaian proses pencalonan kepala daerah pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali. Faktor anggaran memang sangat vital dalam proses persiapan calon kepala daerah, maka dari itu dari pihak Partai Golkar menyatakan sikap politik untuk mendukung dan tidak mencalonkan dari koalisi partai politik lainnya untuk melawan pasangan calon tunggal. Selain faktor umum yang telah disampaikan mengenai anggaran, faktor secara khusus yang dalam hal ini menjadi

suatu perhatian dalam problematika tersebut keterkaitannya pada aktor non politik sebagai tokoh kuat yang berasal dari daerah tersebut, atau yang sering disebut dengan *local strongman*.

Faktor lainya yaitu mengenai mengenai netralitas birokrasi yang menjadi fokus perhatian juga dalam problematika fenomena calon tunggal tersebut. Dikarenakan kekuatan dari penguasa yang dituangkan dalam keputusan politik bisa mempengaruhi terhadap netralitas birokrasi dalam proses penyelenggaraan pilkada. Pernyataan yang telah disampaikan oleh informan dari perwakilan Partai Golkar Kabupaten Boyolali perlu diperkuat kembali mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Pernyataan mengenai faktor-faktor baik secara umum maupun khusus juga disampaikan oleh perwakilan PKS Kabupaten Boyolali. Seperti yang disampaikan pada pernyataan sebelumnya mengenai posisi PKS Boyolali yang tidak mendukung maupun berkoalisi dengan pasangan calon tunggal, atau yang disebut sebagai kelompok oposisi pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020. Berikut merupakan wawancara dengan Nur Arifin, selaku Ketua Pks Kabupaten Boyolali yang menyatakan bahwa:

``PKS Kabupaten Boyolali.melihat adanya kekuatan yang digunakan oleh penguasa dalam menggunakan mobilisasi birokrasi untuk upaya sebagai mempertahankan kekuasaan dengan dominasi politik yang dijadikan sebagai cara untuk memberikan keterbatasan ruang bagi partai politik lainnya'' (Hasil wawancara dengan Nur Arifin, selaku Ketua PKS Kabupaten Boyolali) Pernyataan yang disampaikan oleh Nur Arifin, selaku Ketua PKS Kabupaten

Boyolali menjadikan penguatan pada pernyataan yang disampaikan oleh informan perwakilan Partai Golkar, mengenai sistem hegemoni politik yang terjadi di daerah tersebut. Probematika mengenai netralitas birokrasi yang dalam ini ddiduga terjadi pada penyelenggaraan pilkada tersebut akan menciderai proses keberlangsungan

jalannya demokrasi di daerah tersebut. Peran dari birokrasi yang jelas diatur dalam peraturan terkait sikap independensi menyikapi pemilihan kepala daerah. Praktik yang terjadi di lapangan, kekuatan yang sangat besar dari kelompok tersebut mempersiapkan konsep yang tersistem sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan melalui keputusan maupun kebijakan politik oleh penguasa.

Pilkada yang seharusnya netral dari intervensi birokrasi menjadi suatu hal yang sangat penting. Dikarenakan pilkada juga memberikan kesempatan secara luas kepada masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang terbaik untuk meneruskan tongkat kepemimpinan di daerah tersebut. Keberpihakan birokrat terhadap salah satu kontestan atau dalam melihat realita yang terjadi pada lapangan, dengan keberpihakan dukungan pada pasangan calon tunggal tentu saja mengurangi kebermaknaan politik. Mengenai dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa informan, dalam ini akan diperkuat dipertegas kembali terkait adanya pernyataan tersebut dari pandangan LSM yang berfokus pada pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, yang diwakili oleh Andi Sardjono, selaku Ketua KIPP Kabupaten Boyolali yang menyatakan bahwa:

“Faktor terkait netralitas birokrasi pada sikap politik yang diambil, menjadi fokus kami juga untuk menyebarluaskan pesan penting terkait pendidikan politik. Karena dalam hal ini nantinya akan juga mengurangi dari praktik tidak netralnya birokrasi dalam tahapan Pemilu maupun Pilkada.” (Hasil wawancara dengan Andi Sardjono. Ketua LSM KIPP Kabupaten Boyolali)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak LSM KIPP Boyolali ditegaskan mengenai faktor pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik suatu hal yang menjadi kunci keberhasilan proses demokrasi, dikarenakan dalam hal ini pemahaman masyarakat terhadap pilihan politik yang diambil.

Pendidikan politik juga akan berpengaruh untuk melawan proses yang akan menciderai kebermaknaan demokrasi berpolitik di dalamnya. Salah satunya bila ada dugaan terhadap tidak netralnya sikap politik dari birokrasi yang ddalam hal ini saja dilakukan oleh pemimpin di daerahnya. Faktor pendidikan politik juga dalam kondisi yang terjadi di lapangan, memiliki perbedaan yang signifikan antara masyarakat kota dan masyarakat kabupaten yang biasanya dalam hal ini tingkat pendidikan politiknya masih rendah.

Terkait pengaruh pendidikan politik terhadap masyarakat, dengan pengaruhnya pada teerjaddinya fenomena calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020, peneliti juga melakukan wawancara dengan perwakilan pemilih. Informan tersebut merupakan perwakilan pemilih bernama Bapak Eko Maryoto yang bertempat tinggal di Desa Randusari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali yang juga berprofesi sebagai pegawai negeri di salah satu instansi pemerintahan daerah Kabupaten Boyolali. Pada pelaksanaan wawancara, Bapak Eko Maryoto menyatakan bahwa:

``Pada penyelenggaraan Pilkada Boyolali tahun 2020, saya mendukung pasangan calon tunggal. Mayoritas juga mendukung pasangan tersebut dengan latar belakang figur politik dan juga pengaruh terkait partai pengusung dari pasangan calon tunggal tersebut.'' (Hasil wawancara dengan Eko Maryoto, selaku perwakilan pemilih)

Pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan pemilih masyarakat Kabupaten Boyolali dengan melihat faktor figur politik dan juga Partai PDI-Perjuangan yang merupakan dari partai pengusung dari pasangan calon tunggal tersebut. Ada pernyataan selanjutnya, informan juga menegaskan kaitannya

pengaruh kelompok yang mendominasi dengan terjadinya Pilkada Calon Tunggal di Kabupaten Boyolali dengan menyatakan bahwa:

“Kaitannya calon tunggal yang terjadi di Boyolali, bisa dikaitkan dengan hasil suara parlemen yang menghasilkan dominasi secara kuat bagi Partai Pdi Perjuangan. Masyarakat Boyolali pun cenderung memilih pilihan politik tersebut dengan atas dasar loyalitas mereka terhadap partai politik tersebut yang sudah terbangun sejak lama.” (Ungkap Bapak Eko Maryoto)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Informan menguatkan kembali mengenai pengaruh pendidikan politik kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pengaruh dari terjadinya Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali, salah satunya disebabkan oleh dominasi PDI-P pada parlemen juga memperlihatkan kekuatan dukungan partai tersebut oleh masyarakat Kabupaten Boyolali. Bila hal ini dikaitkan dengan sikap pilihan politik masyarakat dianggap sebagai sikap pragmatis yang diambil oleh masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Kekuatan yang dibangun oleh penguasa melalui loyalitas masyarakat pada pilihan politik yang diambil, juga menjadikan partai politik lainnya terdapat kendala dengan keterbatasan ruang untuk tampil di kalangan masyarakat.

Pilkada merupakan suatu gambaran realitas moralitas politik yang terjadi di Indonesia. Dalam hal ini melihat dari lembaga penyelenggara Pilkada tersebut, partai politik yang mengikuti proses penyelenggaraan tersebut, kemudian juga masyarakat sebagai pemilih dalam proses penyelenggaraan Pilkada tersebut. Pilkada dengan calon tunggal juga menjadikan suatu tantangan terhadap proses demokrasi yang diukur dari kualitas keberjalanan demokrasi yang beriringan dengan kebernaan proses berpolitik. Mengenai beberapa paparan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber mendapatkan suatu dugaan proses sikap

maupun tindakan politik yang mencederai keberlangsungan demokrasi. Dapat disimpulkan dari paparan pernyataan yang telah disampaikan mengenai tingkat rendahnya kualitas pendidikan politik akan berpengaruh pada kesempatan dari pihak yang menggunakan peluang tersebut untuk menguntungkan dengan cara yang tidak adil dan tidak sesuai dengan makna keberlangsungan proses demokrasi. Dikarenakan dari pernyataan yang telah disampaikan, terdapatnya dugaan mengenai netralitas birokrasi dan faktor *local strongman* sebagai aktor diluar penguasa untuk mengatur dari mobilisasi kekuasaan menjadi permasalahan-permasalahan yang menyelimuti penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boyolali pada tahun 2020.

3.3 Analisis Perbandingan Calon Tunggal dalam Pilkada Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali

Analisis perbandingan ini bertujuan untuk menjelaskan dari persamaan dan perbedaan yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Studi perbandingan dari kedua daerah tersebut dilihat dari kajian teori yang digunakan, yaitu melihat dari faktor-faktor penyebab terjadinya calon tunggal, antara lain;

3.3.1 Regulasi Ambang Batas

Faktor regulasi ambang batas merupakan faktor legal formal dalam penyebab terjadinya calon tunggal pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali. Terdapatnya aturan Undang-Undang Pilkada No.10 Pasal 40 Tahun 2016, mengenai terselenggaranya syarat pengajuan pencalonan kepala daerah yang

hendak maju melalui jalur partai politik harus diusung oleh partai politik di DPRD dengan memiliki kursi sejumlah 20% (dua puluh) dari jumlah kursi DPRD atau suara sah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum angka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Hal ini menjadikan salah satu faktor penyebab terjadinya calon tunggal di Kabupaten Boyolali, dikarenakan hegemoni politik yang terjadi oleh Partai PDI-P mengakibatkan keterbatasan peluang bagi partai politik lainnya untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020.

3.3.2 Petahana dan Figur Politik

Peran pengaruh petahana dalam proses terjadinya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal menjadi indikator faktor dari penyebab terjadinya fenomena tersebut. Hal ini seperti yang terjadi pada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pilkada Kota Semarang tahun 2020 yang merupakan pasangan petahana. Pasangan calon tunggal dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali, dari calon kepala daerah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Boyolali juga memiliki pengaruh secara figur politik terkait popularitas di kalangan masyarakat. Pengaruh petahana dalam terciptanya fenomena calon tunggal di kedua daerah tersebut, dibenarkan oleh beberapa informan yang menyampaikan pada pernyataan sebelumnya. Pengaruh kinerja yang dilakukan oleh Petahana dari Hendi-Ita dalam memimpin Kota Semarang pada periode 2015-2020 menghasilkan beragam prestasi maupun penghargaan. Selain itu juga menghasilkan kinerja yang baik hingga menciptakan pada kepuasan masyarakat, faktor tersebut yang menyebabkan dari partai politik yang memiliki suara di parlemen berpikir ulang untuk mengajukan

calon kepala daerah untuk bertarung pada kontestasi Pilkada Kota Semarang tahun 2020.. Hal ini membuktikan dari jawaban informan terkait faktor penyebab terjadinya calon tunggal pada Penyelenggaraan Pilkada Kota Semarang dipengaruhi oleh faktor petahana yang memiliki kinerja dan juga figur politik yang cukup kuat di kalangan masyarakat.

Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Boyolali yang dilaksanakan dengan calon tunggal juga memiliki keterkaitannya pada pengaruh petahana dan figur politik. Hal tersebut juga seperti yang disampaikan pada pernyataan informan sebelumnya, yang menegaskan mengenai kekuatan dari petahana yang memiliki popularitas dan elektabilitas di kalangan masyarakat, diseimbangi juga figur politik yang merupakan dari kader dari Partai PDI Perjuangan. Hal ini menjadikan pengaruh kuat dengan tidak adanya lawan politik yang memiliki figur politik secara kuat untuk bertarung dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Boyolali pada tahun 2020. Pengaruh faktor petahana dan figur politik menjadikan persamaan dari terjadinya calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali. Tetapi dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan dari indikator kinerja petahana. Kinerja dari Calon Kepala Daerah Kabupaten Boyolali yang dahulu menjadi Wakil Bupati Kabupaten Boyolali tidak menjadi pengaruh kuat dalam terjadinya fenomena tersebut, hal tersebut berbeda dengan kinerja petahana Hendi-Ita yang mendapatkan respon yang sangat positif oleh masyarakat Kota Semarang.

3.3.3 Kegagalan Pendidikan Politik

Fenomena kemunculan calon tunggal pada ajang penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, tidak terlepas dari peran kegagalan pendidikan politik yang dilakukan

oleh internal partai politik untuk melakukan kaderisasi kepemimpinan di tingkat daerah. Namun pengaruh pendidikan politik dalam terjadinya calon tunggal di Kota Semarang, tidak menjadi pengaruh terlalu kuat. Hal ini dikarenakan faktor kinerja petahana yang menjadikan pengaruh besar terjadinya fenomena tersebut. Pendidikan politik di Kota Semarang sudah dilaksanakan oleh partai politik dengan baik melalui dilaksanakannya kaderisasi pada partai politik. Begitupun juga pendidikan politik kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kota Semarang hampir sebagian besar, sudah memahami dari pendidikan politik secara terbuka dikarenakan adanya fasilitas ruang diskusi maupun media yang mendukung guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pendidikan politik.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Boyolali, justru berkebalikan dengan apa yang terjadi di Kota Semarang dari segi pendidikan politik. Masyarakat Kabupaten Boyolali yang sebagian besar masih rendah dalam tingkat pendidikan secara umum berdampak pada kualitas pendidikan politik yang masih rendah di kalangan masyarakat Kabupaten Boyolali. Hal tersebut yang juga diduga, menjadikan peluang dari calon kepala daerah memanfaatkan potensi tersebut guna untuk mempertahankan kekuasaannya. Sistem tersebut dibangun dengan melihat dari karakter masyarakat Boyolali yang cenderung pragmatis dalam memilih pemimpin dengan melihat indikator partai politik saja, tidak terlalu berpengaruh pada ide maupun gagasan dari calon pemimpin tersebut.

Melihat dari realita yang terjadi terkait pengaruh pendidikan politik yang terjadi di Kabupaten Boyolali, dalam hal ini dimanfaatkan oleh calon kepala daerah secara individu maupun kelompok dengan melakukan dominasi kekuasaan yang

dibangun dari sistem parlemen. Dikarenakan dalam hal ini, akan berakibat pada tidak terdapatnya ruang bagi lawan politik untuk bertarung dalam kontestasi pilkada, yang disebabkan dengan syarat ambang batas parlemen untuk mencalonkan kepala daerah melalui partai politik tersebut. Begitupun juga kegagalan pendidikan politik terjadi pada kaderisasi partai politik, dengan tidak adanya figur politik yang mampu bertarung pada Pilkada Kabupaten Boyolali melawan dari pasangan calon tunggal. Pengaruh tersebut juga disebabkan keterbatasan ruang dari partai politik lainnya untuk melahirkan figur politik yang layak dari segi popularitas maupun kemampuan kepemimpinan yang dimiliki.

Dari paparan yang telah disampaikan pada penjelasan di atas, menunjukkan perbedaan terkait faktor lahirnya calon tunggal di kedua daerah tersebut. Pengaruh pendidikan politik dari hasil penelitian yang terjadi di lapangan juga dipengaruhi oleh letak geografis dari kedua daerah tersebut. Perbedaan tersebut terletak pada tidak meratanya tingkat pendidikan bagi kalangan masyarakat kabupaten, bila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Hal ini bisa menjadi suatu dugaan sementara, terjadinya pilkada calon tunggal sebagian besar terjadi di kabupaten. Hal ini dikarenakan kualitas rendahnya tingkat pendidikan politik bagi masyarakat, yang menyebabkan peluang dari calon kepala daerah memanfaatkan potensi tersebut.

3.3.4 Biaya Politik

Biaya politik merupakan salah satu faktor yang penting dalam persiapan pada proses Pilkada. Biaya politik ini digunakan untuk anggaran yang diperlukan secara wajar untuk mendukung operasional aktivitas kegiatan yang dilakukan peserta

pemilu. Biaya tersebut meliputi kebutuhan dalam proses administrasi, operasional tim sukses maupun kampanye. Mengenai faktor biaya politik dalam terjadinya pilkada calon tunggal di kedua daerah, disampaikan oleh perwakilan informan di kedua daerah tersebut yang menyatakan terdapat persamaan pengaruh biaya politik yang mahal dalam terjadinya Pilkada calon tunggal. Pernyataan tersebut melatarbelakangi pada pengaruh kuat faktor petahana yang mengikuti pilkada tersebut, dari lawan politik yang akan mencalonkan dari partai politik lainnya akan berpikir kembali terkait pengaruh mahal biaya politik yang harus dipersiapkan dalam bertarung pada kontestasi Pilkada calon tunggal tersebut. Selain pengaruh petahana yang memiliki kinerja yang baik pada saat memimpin Kota Semarang kemudian pengaruh figur politik, dengan memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi di kalangan masyarakat menjadikan partai politik lainnya, tidak mengajukan lawan politik pada Pilkada Kota Semarang dengan salah satu faktor mahal biaya politik yang dipersiapkan.

Pernyataan yang selaras juga disampaikan oleh informan terkait Pilkada calon tunggal Kabupaten Boyolali, yang menyatakan salah satu penyebab terjadinya calon tunggal dikarenakan faktor biaya politik yang tinggi untuk bertarung melawan petahana. Faktor petahana yang memiliki figur politik cukup kuat dan juga karakteristik masyarakat yang cenderung pragmatis dalam memilih calon pemimpin, menjadikan biaya politik yang mahal untuk mengalahkan calon tunggal tersebut. Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh beberapa narasumber, bisa menjadikan suatu dugaan bahwa faktor penyebab terjadinya Pilkada calon tunggal yang terdapat di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali dikarenakan pengaruh

mengenai anggaran politik yang harus dipersiapkan untuk bertarung dalam kontestasi pilkada calon tunggal tersebut.

3.3.5 Komunikasi Politik

Komunikasi politik salah satu hal yang dibutuhkan untuk menjalin hubungan yang berorientasi politik. Hubungan politik yang dibangun dengan langkah komunikasi yang terencana dengan mempertimbangkan beberapa target politik tertentu yang ingin dicapai bersama. Aspek tersebut terjadi pada penyelenggaraan Pilkada yang terjadi di Kota Semarang pada tahun 2020. Latar belakang calon yang merupakan petahana dan juga figur politik dari partai yang memiliki suara tertinggi di parlemen, memudahkan komunikasi politik yang dibangun dengan partai politik lainnya. Hal tersebut sesuai penyampaian beberapa perwakilan informan partai politik di Kota Semarang, yang membenarkan langkah komunikasi politik yang dilakukan oleh petahana untuk merangkaul semua partai politik dalam berkolaborasi membangun Kota Semarang. Atas dasar faktor tersebut juga yang menyebabkan partai politik lainnya, tidak mengajukan lawan politik karena sudah terjadinya komunikasi politik yang cukup baik oleh petahana kepada partai politik lainnya.

Terdapatnya perbedaan terkait komunikasi politik yang dibangun yang terjadi di Kabupaten Boyolal. Hal tersebut dipengaruhi terdapatnya dominasi suara di parlemen dari partai Pdi Perjuangan Kabupaten Boyolali, selaku partai pengusung calon tunggal. Hal tersebut yang menjadikan kekuatan bagi calon tunggal, dikarenakan keteratasanya peluang bagi lawan politik. Hal tersebut dibenarkan oleh para perwakilan partai politik di Kabupaten Boyolali, yang menyatakan tentang dukungannya terhadap calon tunggal dari Partai Golkar dikarenakan faktor figur

politik saja, bukan dari komunikasi politik yang telah dibangun dari petahana maupun partai politik dengan dukungan Partai Golkar. Terdapatnya perbedaan langkah komunikasi politik yang terjadi pada Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali dan Kota Semarang, dikarenakan peran petahana dalam berkinerja membangun daerahnya masing-masing.

3.4 Analisis Perbandingan Calon Tunggal dalam Pilkada Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali dari Segi Perspektif Hegemoni Politik

Penyelenggaraan Pilkada calon tunggal yang terjadi di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali memiliki perbedaan dan persamaan melihat dari faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena tersebut. Dari penjelasan yang disampaikan pada pernyataannya sebelumnya, terdapat persamaan dari penyebab terjadinya fenomena pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali, yaitu terletak pada pengaruh regulasi terselenggaranya penyelenggaraan Pilkada calon tunggal. Selain itu faktor figur politik dan biaya politik juga menjadi pengaruh pada terjadinya fenomena tersebut. Mengenai perbedaan terkait terjadinya Pilkada calon tunggal yang terdapat di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali terdapat pada faktor pendidikan politik dan juga terkait langkah komunikasi politik yang dibangun. Faktor-faktor dari penyebab terjadinya fenomena tersebut, juga sebagai langkah untuk mengidentifikasi terkait hegemoni politik yang terjadi pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali.

Penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali melihat dari segi perspektif hegemoni politik, terdapat perbedaan yang terjadi, hal ini juga ditegaskan oleh para informan yang menyampaikan mengenai

keterkaitan hegemoni politik dengan fenomena yang terjadi. Pilkada calon tunggal di Kota Semarang, dari hasil penelitian yang terjadi di lapangan juga dari data sekunder yang didapatkan, faktor kuat yang menyebabkan terjadinya Pilkada calon tunggal karena faktor kinerja petahana. Langkah yang dilakukan oleh Hendi-Ita sebagai petahana dalam membangun Kota Semarang dinilai masyarakat sudah baik dan hal ini menjadikan sikap politik dari partai politik lainnya mendukung dari petahana dalam kontestasi Pilkada Kota Semarang tahun 2020. Keterkaitannya dengan pengaruh hegemoni politik yang terjadi, tidak menjadi suatu hal pertimbangan yang cukup kuat, dikarenakan bila melihat dari komposisi suara parlemen, cukup berimbang mengenai jumlah kursi dari masing-masing partai politik. Walaupun dalam hal ini, Pdi Perjuangan Kota Semarang memiliki 19 kursi dari total 50 kursi yang terdapat di Dprd Kota Semarang, tetapi hal ini tidak menjadikan pengaruh kuat terkait terjadinya hegemoni politik pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang.

Kondisi yang berbeda terjadi pada penyelenggaraan Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali bila melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Dari pernyataan yang telah disampaikan para informan yang menyatakan terkait adanya hegemoni politik yang terjadi pada fenomena tersebut, diperkuat juga mengenai dari data sekunder yang didapatkan. Fenomena tersebut melihat dari data lapangan yang dikaji, disebabkan oleh gagalnya pendidikan politik yang terjadi di daerah tersebut. Kegagalan pendidikan politik tersebut, bila dikaitkan dengan praktik hegemoni politik, hal tersebut merupakan salah satu sistem yang sudah dikonsepsikan oleh penguasa guna mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Kekuatan

dominasi yang dibangun melalui sistem parlemen, juga merupakan salah upaya yang dilakukan oleh penguasa, dengan memanfaatkan karakteristik pilihan politik dari masyarakat Kabupaten Boyolali yang cenderung pragmatis pada pilihan kepada salah satu partai politik tertentu saja. Kondisi tersebut yang dimanfaatkan oleh penguasa, guna membangun pola kekuatan dominasi melalui sistem parlemen, yang mengakibatkan pada keterbatasan ruang pada lawan politik untuk mengikuti ada kontestasi Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020 dikarenakan adanya syarat mutlak mengenai ambang batas pencalonan kepala daerah melalui partai politik.

Pola kekuatan dominasi yang dibangun oleh penguasa dalam upaya mempertahankan kekuasaan yang dimiliki juga terdapat keterkaitannya juga pada pengaruh sistem oligarki politik yang terjadi di daerah setempat. Salah satu bukti terjadinya oligarki politik, dengan terdapatnya peran *local strongman* yang menjadi aktor politik dan non politik di dalam terjadinya fenomena tersebut. Hal ini bila dikaitkan dengan beberapa pernyataan informan, yang menyatakan terdapat peran *local strongmen* pada terjadinya Pilkada calon tunggal di Kabupaten Boyolali. Tokoh kuat di daerah tersebut memiliki relasi politik yang menjadikan dari tokoh tersebut, bisa mengatur terjadinya fenomena tersebut karena kekuatan sumber daya sosial, ekonomi dan politik yang dimilikinya. Tokoh kuat yang dimaksud yaitu Seno Kusumoarjo atau yang akrab disebut Seno Gede, beliau merupakan salah satu sesepuh di Partai Pdi Perjuangan Kabupaten Boyolali dan juga merupakan kakak kandung dari Seno Samodra yang merupakan Bupati Boyolali di periode sebelumnya, Relasi politik yang kuat tersebut disinyalir pada keterkaitannya sebagai aktor di balik layar yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

Terkait dari penjelasan yang telah disampaikan mengenai keterkaitan Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali melihat dari segi perspektif hegemoni politik. Terdapat beberapa faktor yang merupakan suatu indikator terjadinya hegemoni politik. Indikator tersebut mengarah pada adanya kelompok dominan yang berpengaruh pada suatu problematika tertentu, kemudian masyarakat secara sadar menerima terkait adanya pengaruh dominasi politik tersebut. Hal lain yang menjadi salah satu bukti kuat terjadinya hegemoni politik yaitu penguasa melakukan praktik dominasi tersebut dengan cara tersistem, dan seolah-olah masyarakat tidak menyadari bahwa praktik tersebut sudah dikonsepsikan oleh penguasa sebagai alat mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Kondisi tersebut terdapat perbedaan terkait Pilkada calon tunggal di Kota Semarang dan Kabupaten Boyolali bila ditinjau dari segi perspektif hegemoni politik. Terkait aspek-aspek pola hegemoni politik yang telah disampaikan terjadi pada penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Boyolali tahun 2020, yang menjadikan juga faktor kuat terjadinya Pilkada calon tunggal di daerah tersebut. Hal ini berbeda dengan yang terjadi pada Pilkada Kota Semarang dikarenakan, faktor kinerja petahana yang lebih mendominasi dari terjadinya fenomena tersebut.